ANALISIS DAMPAK PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUALTERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

(Studi Kasus :Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Musi Banyuasin)

Oleh : Ahmad Irfansyah

STIE Rahmaniyah Sekayu
Email: irfansyahahmad2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap laporan keuangan. Dimana dalam penelitian ini akan melihat perubahan penyajian laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil studi kasus pada Badan pengelola Keuangandan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasian Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan BPKAD terlihat dari perubahan pada pos pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan relevan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran.

Kata Kunci : Akuntansi Berbasis Akrual, Laporan Keuangan, Pendapatan, Beban, Aset.

1. Latar Belakang Masalah

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa yang akan datang. Karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka desentralisasi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin melalui bidang akuntansi pada Tahun 2014 masih menerapkan sistem laporan berbasis kas.Pada Tahun 2015 Laporan keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 secara bertahap menjadi Laporan Keuangan berbasis akrual. Namun setiap perubahan memerlukan tahapan yang panjang dan melelahkan. Perubahan memerlukan penyediaan prasarana fisik, peraturan yang mendukung, sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi, strategi yang tepat dan yang terpenting kemauan serta dukungan pimpinan dalam mengawal proses perubahan ini.

Laporan keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 sudah menerapkan basis akrual. Namun untuk kegiatan operasional sehari-hari yang terjadi, basis akrual belum sepenuhya diterapkan dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari seringnya terjadi keterlambatan pelaporan keuangan yang diterima oleh bidang akuntansi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dari bidang-bidang lain yang ada di BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin.

Perubahan komponen laporan keuangan dari basis kas menuju akrual menjadi akrual menyebabkan kesulitan staf mengkonversikan komponen laporan keuangan terutama dalam hal pendapatan dan biaya yang dari sebelumnya hanya pendapatan dan biaya saja setelah menggunakan basis akrual pendapatan dan biaya terdapat dalam Laporan Realisasi Anggararan dan Laporan Operasional..

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual mengkonversikan komponen basis kas menuju akrual menjadi akrual harus melalui tahapan dan perhitungan yang benar serta membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan sistem yang memadai.Kurangnya beberapa dukungan untuk mewujudkan laporan

keuangan dari basis kas menuju akrual berdampak pada sering terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan dan keterlambatan waktu dalam penyampaian laporan kepada bagian akuntansi, sehingga laporan keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin belum sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akrual.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Dampak Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Pelaporan Keuangan"

2. Kajian Teori

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Mahsun (2013:72), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikan, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

2.2 Basis Standar Akuntansi Pemerintahan

Darise (2008:38), Basis Akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transasksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua), yaitu basis kas dan basis akrual.

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas

Halim (2012:54), basis kas menetapkan bahwa pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka

transaksi tersebut tidak dicatat. Basis akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 sebagai berikut pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran menggunakan basis kas sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban dan ekuitas dalam neraca menggunakan basis akrual.

Akuntansi berbasis kas ini mudah untuk dimengerti dan dijelaskan. Keterbatasan akuntansi berbasis kas adalah hanya berfokus pada arus kas dalam periode pelaporan berjalan, dan mengabaikan arus sumber daya lain yangmungkin berpengaruh pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa saat ini dan saat mendatang.

2.2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Halim (2012:54), basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Basis Akrual mampu menghasilkan informasi yang lengkap dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas. Tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Strategi pengembangan standar akuntansi pemerintah (SAP) dilakukan melalui proses transisi dari basis kas menuju akrual yang disebut cash toward accrual. Dengan basis ini pendapatan, belanja, dan pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang dan ekuitas dicatat berdasarkan basis akrual.

2.3 Laporan Keuangan Daerah

PSAP 01 (2010:6), laporan keuangan pemerintah daerah ituadalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu

pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Metodelogi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan. Kolonel Wahid Udin Lk. VII, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu. Waktu penelitian ini lebih kurang 3 (tiga) bulan terhitung dari Bulan Juli-September 2018.

Adapun jenis data yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, maupun dokumentasi, berupa Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016.

3.2 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan BPKADTahun 2014 sampai dengan 2016 dengan melihat dan membandingkan indikator laporan keuangan diantaranya tepat waktu, relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami, meliputi fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan serta prosedur dan ketentuan dalam penerapan SAP berbasis akrual tersebut, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

4.1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan BPKAD Sebelum dan Setelah Berbasis Akrual

Laporan Keuangan BPKAD mengalami beberapa perubahan komponen dalam penyajian laporan keuangan dari sabelum menerapkan akuntansi berbasis akrual dan setelah menerapkan akuntasi basis akrual. Perubahan komponen tersebut yaitu :

4.1.1. Penyajian Laporan Keuangan BPKAD Sebelum Berbasis Akrual

Sebelum menerapkan basis akrual BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sudah menerapkan basis kas terlihat dari Komponen Laporan Keuangan yang digunakan oleh BPKAD hanya ada 3 (tiga) Jenis Laporan Keuangan saja yaitu Laporan Realiasasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan berikut ini:

1. Neraca

Tabel 1.
Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Neraca
Periode Desember 2014

(Dalam Rupiah)

Uraian	2014
Aset	50.168.563.984,00
Aset Lancar	24.332.163.602,00
Aset Tetap	25.247.337.995,00
Dana Cadangan	0
Aset Lainnya	589.062.387,00
Kewajiban	0
Kewajiban Jangka Pendek	0
Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Kewajiban	0
Ekuitas Dana	50.168.563.984, 00
Ekuitas Dana Lancar	24.332.163.602,00
Ekuitas Dana Investasi	25.836.400.382, 00
Ekuitas Dana Cadangan	0

Sumber: BPKAD, Tahun 2018, data diolah

Tabel 1. adalah Laporan Neraca BPKAD pada tahun 2014 dimana menunjukan komponen yang digunakan belum berbasis akrual. Pos Ekuitas yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) pos yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Pada Tahun 2014 BPKAD memiliki Aset senilai Rp.50.168.563.984,00 berasal dari Aset Lancar sebesar Rp.24.332.163.602,00, Aset tetap sebesar Rp.25.247.337.995,00, dan Aset Lainnya Rp.589.062.387,00. begitupun dengan sebesar Nilai Ekuitas sebesar Rp.50.168.563.984,00 berasal Ekuitas Dana dari Lancar sebesar Rp.24.332.163.602,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp.25.836.400.382, 00.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel 2.
Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Periode Desember 2014

(Dalam Rupiah)

Kode Rek	Uraian	2014	
		Anggaran	Realisasi
4	Pendapatan	115.964.450.249,91	96.976.181.258,96
4.1	Pendapatan Asli Daerah	115.964.450.249,91	96.976.181.258,96
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56.326.812.000,00	61.581.296.010,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.293.500.000,00	1.990.106.894,58
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	48.344.138.249,91	33.404.778.354,38
5	Belanja	67.238.276.349,00	57.471.005.144,00
5.1	Belanja Tidak Langsung	32.563.799.349,00	28.524.490.627,00
5.1.1	Belanja Pegawai	32.563.799.349,0;l. 0	28.524.490.627,00
5.2	Belanja Langsung	34.674.477.000,00	28.946.514.517,00
5.2.1	Belanja Pegawai	5.566.091.000,00	4.090.635.000,00
5.2.2	Belanja Barang / Jasa	17.128.508.000,00	13.235.815.917,00
5.2.3	Belanja Modal	11.979.878.000,00	11.620.063.600,00
	SURPLUS/DEFISIT	48.726.173.900,91	39.505.176.114,96
	SISA LEBIH/KURANG EMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	48.726.173.900,91	39.505.176.114,96

Sumber: BPKAD, Tahun 2018, data diolah

Tabel 2. adalah Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2014 pada saat belum menerapkan basis akrual terlihat dari komponen Laporan Realisasi Anggaran yang ada masih menggunakan Basis Kas dimana transaksi kas dan non kas di catat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Jika terjadi Silpa/Sikpa pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Neraca pada post Ekuitas Dana Lancar. Pada Tahun 2014 BPKAD mengalami Surflus/Defisit sebesar Rp.39.505.176.114,96 dari Anggaran sebesar Rp.48.726.173.900, 91

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK, Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yangperlu dipertimbangkan untuk disajikan adalah Pengakuan pendapatan dan Pengakuan belanja.

4.1.2. Penyajian Laporan Keuangan BPKAD Setelah Berbasis Akrual

Laporan Keuangan BPKAD pada Tahun 2015, 2016, 2017 dimana BPKAD mulai menerapkan Basis Akrual dalam penyajian Laporan Keuangan BPKAD dan komponen yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan berikut ini:

1. Neraca

Tabel 3.
Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Neraca
Periode Desember 2015-2017

(Dalam Rupiah)

			1 /
Uraian	2015	2016	2017
Aset			
Aset Lancar	21.324.691.151,24	27.023.219.004,48	109.903.425,00
Investasi Jangka Panjang	0	0	0
Aset Tetap	12.956.407.555,00	26.668.617.908,00	31.596.622.259,00
Dana Cadangan	0	0	0
Aset Lainnya	525.360.387,00	467.456.639,00	51.777.768,00
Jumlah Aset	34.806.459.093,24	54.159.293.551,48	31.758.303.452,00
Kewajiban		0	0
Kewajiban Jangka Pendek	(46.835.188.747,14)	0	0
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Ekuitas	81.641.647.840,38	54.159.293.551,48	31.758.303.452,00
Jumlah Kewajiban+Ekuitas	34.806.459.093,24	54.159.293.551,48	31.758.303.452,00

Sumber:BPKAD, Tahun 2018, data diolah

Tabel 3. adalah Laporan Neraca Setelah Berbasis Akrual dimana Post Ekuitas hanya Ekuitas saja dan pada Post Aset Lancar terdapat tambahan akun belanja dibayar dimuka dan pada post Kewajiban ada tambahan akun pendapatan diterima dimuka. Dalam tabel diatas dapat terlihat perubahan nilai aset lancar.

2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggran (LRA) BPKAD setelah berbasis akrual dimana yang dicatat dan disajikan dalam LRA hanya transaksi kas saja, dan Silpa/Sikpa pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Neraca. Tahun 2015

Pendapatan Asli Daerah-LRA yang di Anggarkan sebesar Rp.120.234.653.432,85 Yang Terealisasi sebesar Rp.92.837.368.579,14 terdiri dari Pendapatan Pajak Rp.64.500.000.000,00, Daerah-LRA sebesar teraslisasi sebesar Rp.53.150.297.670,50, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sebesar Rp.15.322.901.587,89 terealisasi Dipisahkan-LRA sebesar Rp.11.147.901.587,63 Lain-lain dan Pendapatan yang Sah sebesar Rp.40.411.751.844,96. terealisasi sebesar Rp.28.539.169.321,01.

Tahun 2016 mengalami penurunan berdasarkan Realisasi dari tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah-LRA yang di Anggarkan sebesar Rp.95.766.181.666,96 Yang Terealisasi sebesar Rp.84.468.923.803,56 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp.66.037.462.273,00, teraslisasi sebesar Rp.59.484.298.430,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp.12.593.331.104,75 terealisasi sebesar Rp.12.593.331.104,75 Lain-lain dan Pendapatan yang Sah sebesar Rp.17.135.388.289,21. terealisasi sebesar Rp.12.391.294.268,81.

Pada Tahun 2017 BPKAD terpecah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingaa pada Tahun 2017 BPKAD tidak mencatat lagi transaksi Pendapatan dan hanya mencatat transaksi belanja. Anggaran Belanja pada tahun 2017 sebesar Rp.25.458.253.000,00 dan tereaslisasi sebesar Rp.19.929.044.109,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.24.383.836.000,00 terealisasi sebear Rp.18.888.053.549,00 yang dibagi lagi menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp.15.670.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.10.658.497.068,00 belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.8.713.836.000,00 teealisasi sebesar Rp.8.229.556.481,00. dan Belanja Modal sebesar Rp.1.074.417.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.040.990.560,00 terbagi lagi menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.871.617.000,00 terealisasi sebesar Rp840.715.560,00dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebsar Rp.202.800.000,00 terealisasi Rp.200.275.000,00. Tahun 2017 BPKAD mengalami defisit/surplus sebesar (Rp.19.929.044.109,00) dari yang dianggarkan sebesar (Rp.25.458.253.000,00).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional BPKAD pada tahun 2015-2017 dimana transaksi operasional non kas dicatat dan disajikan. Sebelum menerapkan Basis Akrual

Laporan Operasional tidak digunakan karena setiap transaksi kas dan non kas semua dicatat dan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas BPKAD selama satu periode anggaran. Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan:

- 1. Aktivitas Operasi
- 2. Aktivitas Investasi
- 3. Aktivitas Pendanaan
- 4. Aktivitas Transitoris

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan Ekuitas Awal tahun 2015 sebesar Rp.50.168.563.984,00 berasal dari saldo ekuitas dana pada tahun 2014, dan ekuitas awal tahun 2016 sebesar Rp.34.319.583.293,24 merupakan saldo ekuitas awal tahun 2016. suplus/defisit LO tahun 2015 sebesar Rp.52.189.852.901,58, tahun 2016 sebesar Rp.49.560.629.638,82, dan Tahun 2017 sebesar Rp. (177.268.613.376,66) berasal dari Laporan Operasional selisih dari Pendapatan-LO dikurangi beban-LO.

Ekuitas akhir pada tahun 2015 sebesar Rp.81.641.647.840,38, tahun 2016 sesbar Rp.54.159.293.551,48, dan Tahun 2017 Rp.31.758.303.452,00 berasal dari ekuitas awal ditambah surplus/defisit Lo dan dikurangi koreksi.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CaLK juga menyajikan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh BPKAD dan Pengungkapan-pengungkapan yang diharuskan untuk diungkapkan dalam CaLK.

4.2. Analisis Dampak Perubahan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Musi Banyuasin

Komponen Laporan Keuangannya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Setelah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menerapkan basis alrual sepenuhnya, dalam LRA yang sebelumnya mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas dan non keuangan menjadi hanya mencatat transaksi yang berkaitan denga kas saja. Perubahan komponen LRA setelah menerapkan basis akrual yaitu pada pos akun pendapatan yang sebelumnya pos pendapatan menyajikan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari transaksi kas dan non keuangan menjadi Pendapatan-LRA yang menyajikan perbandingan Anggaran pendapatan yang ditargetkan dengan Realisasi pendapatan-LRA yang dihasilkan dari transaksi kas.

Akun pos Belanja yang dari sebelumnya akun belanja dibagi menjadi dalam 2 (dua) pos yaitu pos belanja langsung dan belanja tidak langsung, setelah menerapkan basis akrual penuh pos belanja lebih disederhanakan menjadi 1 (satu) pos yaitu pos belanja saja.

2. Neraca

Perubahan komponen Laporan Neraca BPKAD setelah menerapkan basis akrual sepernuhnya yaitu dari pos Ekuitas yang sebelumnya disebut Ekuitas Dana dan terbagi menjadi 3 (tiga) pos yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan, menajadi pos akun Ekuitas saja. Dalam Akun Aset Lancar juga terdapat tambahan pos akun yaitu pos penyisihan piutang dan belanja dibayar dimuka. Sedangkan dalam pos akun Kewajiban Jangka Pendek terdapat tambahan pos akun utang belanja dan pendapatan diterima dimuka.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL dari yang sebelumnya tidak digunakan oleh BPKAD sebagai salah satu komponen laporan keuangan BPKAD setelah menerapkan basis akrual sepenuhnya LPSAL menjadi salah satu komponen laporan keuangan yang harus disajikan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) dari yang sebelumnya tidak digunakan oleh BPKAD sebagai salah satu komponen laporan keuangan BPKAD setelah menerapkan basis akrual sepenuhnya LO menjadi salah satu komponen laporan keuangan yang harus disajikan. LO mencatat transaksi yang berkaitan dengan non kas, dalam LO menyajikan Pendapatan-LO dan Beban yang dihasilkan dari kegiatan operasional serta surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebelumnya tidak digunakan oleh BPKAD sebagai komponen laporan. Setelah menerapkan basis akrual penuh LPE digunakan sebagai salah satu komponen laporan yang harus di laporkan oleh BPKAD.

6. Laporan Arus Kas

Perubahan Laporan Arus Kas BPKAD setelah menerapkan basis akrual yaitu menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas yang terjadi di BPKAD dalam satu periode pelaporan akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

CALK menyajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. CALK juga menyajikan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh BPKAD dan Pengungkapan-pengungkapan yang diharuskan untuk diungkapkan dalam CALK.

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan tentang Penerapan dan Dampak Penerapan Akuntansi Basis Akrual Terhadap Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Musi Banyuasin sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD setelah penerapan akuntansi berbasis akrual terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo

- Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas laporan Keuangan.
- 2. Dampak penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan BPKAD terlihat dari perubahan pada pos pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan relevan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran.

Adanya tambahan komponen Laporan Operasional dalam Laporan Keuangan BPKAD yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasinal keuangan yang tercermin dalam Pendaptan-Lo, Beban, dan surplus/defisit-Lo. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL untuk pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pos Neraca menyajikan informasi aset secara lebih terperinci dalam penyusutan aset tetap yang sebelumnya tidak diuraikan, juga Ekuitas yang sebelumnya terbagi Ekuitas Dana lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan menjadi hanya Pos Ekuitas saja, sehinga informasi yang disampaikan lebih terinci dan mudah dipahami oleh pengguna, lebih relevan andal dan dapat dibandingkan sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan ekonomi serta dapat memprediksi anggaran pada periode berikutnya. Namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan akuntasi berbasis akrual ini, yaitu sulitnya menkonversikan komponen laporan keuangan yang dilakukan oleh sebagian SKPD di kabupaten Musi Banyuasn dan bagian-bagian yang ada di BPKAD itu sendiri sehingga sering terjadi keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan kepada Bagian Akuntansi BPKAD. Laporan Neraca yang perlu disajikan kembali karena perubahan kebijakan yang digunakan BPKAD terutama dalam pos piutang yang sebelumnya penyisihan piutang tidak dilakukan menjadi harus menyajikan nilai wajar, beban dibayar dimuka yang sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja. Pos Aset tetap harus disajikan kembali dengan nilai wajar setelah dikurangi penyusutan.

3. Tidak semua pegawai yang mengelola SIMDA Keuangan itu memiliki latar pendidikan yang sama dan faham dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dan sulitnya mengkonversikan komponen laporan keuangan tersebut mengakibatkan pegawai bagian akuntansi BPKAD harus menambah waktu kerja dan tenaga untuk membuat laporan keuangan konsolidasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta : Erlangga

Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat

Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S.W. Alexander. 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA 1* V 3 (1), 1-8. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556. diakses tanggal 10 juli 2018. pukul 14:00 wib.

Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi, dan Maulidah, Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat.

Nordiawan, Deddi, dan Hertianti, Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, nhhbn*; *lklm* Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.

Nurlan, Darise. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: PT INDEKS.

Pemerintah Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Satrio, M. Dimas., Yuhertiana, Indrawati., Hamzah, Ardi. 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 18, No 1*, 59-70.